

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang penting bagi manusia. Saat ini ketersediaan air di Indonesia mencapai 15.000 m³ per kapita per tahun, masih diatas rata-rata dunia yang hanya 8.000 m³ per tahun (*World Water Forum II*, 2000 dalam Dharma, (2006)). Penggunaan air dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu penggunaan untuk domestik yaitu air untuk pemenuhan kegiatan sehari-hari atau rumah tangga, kebutuhan non domestik antara lain institusional, komersial, industri dan fasilitas umum, sedangkan yang terakhir yaitu kebutuhan untuk irigasi. Di Indonesia, kebutuhan air untuk keperluan irigasi mencapai 74,1% dari total kebutuhan air. Dimana sektor pertanian dengan irigasi teknis dan non teknis adalah pemakai terbesar air yang diambil dari sumber air sungai, danau, dan air tanah. Seluruh jaringan irigasi di Indonesia saat ini telah mengairi area pertanian seluas 6,7 juta hektar, dan area irigasi terbesar berada di pulau Jawa seluas 48,32% (Dharma, 2006).

Daerah Irigasi (DI) Rombong merupakan salah satu DI terluas di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. DI Rombong memiliki luas total area irigasi seluas 650 Ha, diairi dengan sistem jaringan irigasi sekunder yaitu Jaringan Irigasi (JI) Sekunder Rombong. DI Rombong secara hidrologis berada di Wilayah Sungai (WS) Jratun Seluna, Daerah Aliran Sungai (DAS) Serang. Berdasarkan Peraturan Presiden RI no. 12 tahun 2012 tentang Penetapan Sungai, WS Jratun Seluna ditetapkan sebagai wilayah sungai strategis nasional dan pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat dibawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.

Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan sumber daya air untuk penyelenggaraan irigasi berkaitan dengan keberlangsungan sistem irigasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan yang terus meningkat. Untuk menjaga keberlangsungan sistem irigasi memerlukan biaya pengelolaan sumber daya air irigasi untuk mendukung kegiatan pengelolaan irigasi. Biaya pengelolaan sumber daya air untuk irigasi tersebut terdiri dari biaya sistem informasi, biaya perencanaan, biaya konservasi sumber daya air, biaya operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air, dan biaya pemeliharaan sumber-sumber air, biaya monitoring evaluasi dan pemberdayaan masyarakat, serta biaya

operasional kantor. Komponen biaya yang paling penting adalah biaya operasi dan pemeliharaan karena berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya air (Permen PUPR No. 18/PRT/M/2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan, (2015).

Penyediaan dana untuk pengelolaan sumber daya air irigasi sampai saat ini masih disediakan oleh pemerintah. Penyediaan dana irigasi di Indonesia tahun 2006-2009 dari pemerintah pusat sebesar Rp. 12,836 milyar, dari provinsi Rp. 45,695 milyar, dan dari kabupaten Rp. 254,175 milyar, sehingga alokasi rata-rata hanya sebesar Rp. 46.675,- per hektar. Kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi sebesar Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 250.000,- per hektar, jadi penyediaan dana irigasi oleh pemerintah hanya sekitar 25% dari kebutuhan (Supardi, 2009 dalam Sangkawati (2014)). Pengeluaran terbesar dari anggaran sebesar 57,55% digunakan untuk pemeliharaan, dan 21,29% untuk pemeliharaan saluran 25,06% untuk kegiatan operasi. Keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah tersebut juga menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pengelolaan sumber daya air irigasi secara maksimal. Untuk itu perlunya keterlibatan masyarakat, yaitu petani pada khususnya sebagai penerima manfaat air irigasi untuk ikut serta dalam pengelolaan sumber daya air irigasi.

Bentuk peran serta petani dalam pengelolaan irigasi adalah berupa iuran yang dikelola oleh Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) / Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Apabila peran serta petani ini diperhitungkan sebagai bagian dari BJPSDA maka akan menjadi pengurang subsidi pemerintah dalam sektor pertanian. Peran serta petani dalam pengelolaan irigasi di DI Rombong yang sudah berjalan saat ini adalah dalam bentuk Iuran Pelayanan Air Irigasi (IPAIR) yang dibayarkan oleh petani kepada GP3A. Besarnya IPAIR yang dibayarkan oleh petani di DI Rombong saat ini hanya merupakan kesepakatan antara petani dengan GP3A sebesar Rp. 15.000/Ha atau Rp. 50,-/m³.

Menurut Sangkawati (2009), untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air dengan prinsip *demand-side management* dan meningkatkan penerimaan BJPSDA, maka perlu dilakukan analisis korelasi antara biaya jasa pengelolaan dengan penerima manfaat sesuai dengan peraturan yang berlaku, komitmen bersama, dan besarnya kontribusi biaya yang akan ditetapkan perlu memperoleh kesepakatan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan kriteria yang harus dipenuhi. Anwar dan Utomo (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam menghitung BJPSDA dipengaruhi oleh

faktor kualitas layanan penyediaan air dan nilai manfaat ekonomi dari pemanfaat air. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 18/PRT/M/2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan juga dijelaskan bahwa dalam menghitung BJPSDA memperhitungkan bobot nilai manfaat ekonomi dari pemanfaat air.

Penelitian ini mencoba menganalisis hasil perhitungan BJPSDA sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan, dan model perhitungan BJPSDA dengan metode biaya jasa dasar yang mempertimbangkan faktor kualitas layanan dan nilai manfaat ekonomi. Analisis juga dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kemauan petani dalam membayar BJPSDA. Sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh besaran BJPSDA irigasi, sesuai dengan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan manfaat air irigasi yang diterima petani untuk menjamin kualitas pelayanan irigasi, dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kemauan para petani sebagai pengguna air untuk membayar BJPSDA. Analisa Kelayakan Ekonomi dan Perhitungan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Daerah Irigasi Rombong.

1.2. Perumusan

Dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah :

1. Berapa besaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 18/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan ?
2. Berapa besaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) irigasi menggunakan permodelan biaya jasa dasar dengan mempertimbangkan faktor kualitas layanan dan nilai manfaat ekonomi ?
3. Berapa tingkat Kemampuan membayar / *Ability To Pay* (ATP) dan Kemauan untuk membayar / *Willingness To Pay* (WTP) petani dalam melakukan pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) irigasi?
4. Berapa nilai Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) irigasi DI Rombong ?

1.3. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menetapkan nilai Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) irigasi DI Rombong.
2. Menghitung Nilai Manfaat Ekonomi (NME)
3. Mendapatkan nilai Kemampuan membayar / *Ability To Pay* (ATP) dan Kemauan untuk membayar / *Willingness To Pay* (WTP) petani dalam melakukan pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) irigasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui besaran BJPSDA irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Rombong.
2. Sebagai bahan masukan bagi OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Jepara sebagai pengelola jaringan irigasi, dalam menghitung Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) irigasi terutama pada Daerah Irigasi (DI) Rombong.

1.5. Batasan Penelitian

Agar tercapainya tujuan penelitian ini diperlukan suatu batasan-batasan dari pembahasan sebagai berikut :

1. Penelitian ini penekanannya pada perhitungan, analisa, dan penetapan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi untuk menunjang pengelolaan sumber daya air juga disebut BJPSDA dengan lokasi penelitian DI Rombong.
2. Perhitungan BJPSDA tidak memperhitungkan biaya investasi, hanya biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
3. Daerah penelitian adalah DI Rombong yang berada pada DAS Serang di WS Jratun Seluna, dimana dalam pengelolaannya merupakan kewenangan Kabupaten Jepara (< 1.000 Ha).
4. Perhitungan kebutuhan air di pengambilan utama (intake).
5. Dalam perhitungan air irigasi dan Nilai Manfaat Ekonomi (NME), hanya dihitung NME untuk kepentingan irigasi (padi, tebu, palawija), dalam hal ini dihitung hanya untuk padi dan palawija.

1.6. Metode Mengumpulkan Data

Data primer dikumpulkan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada pengguna air di Daerah Irigasi Rombong dengan menggunakan kuisioner. Data pemanfaatan air untuk Irigasi Pertanian dihitung dengan mengukur volume penampung air dengan intensitas pengisian harian dalam satuan m³. Data pemanfaatan air untuk irigasi pertanian padi sawah didapatkan dengan menghitung biaya yang dikeluarkan untuk pengairan padi sawah per musim tanam. Data pemanfaatan air untuk Industri diperoleh dengan menghitung besarnya kebutuhan air lainnya yang terpakai perbulan. Data sekunder diperoleh dengan pengumpulan data dan informasi dari Dinas PUPR Kab. Jepara, desa maupun literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian.